KOENTJARANINGRAT
MEMORIAL LECTURE XV/2018

INTEGRASI NASIONAL
DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI

Oleh Prof Dr Heddy Shri Ahimsa-Putra, MA

Bentara Budaya Jakarta, Jumat 19 Oktober 2018
Bentara Budaya Yogyakarta, Rabu 31 Oktober 2018

"Masalah kebhinekaan sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya..."

Koentjaraningrat

SAMBUTAN DIREKTUR PROGRAM BENTARA BUDAYA

Tema Koentjaraningrat Memorial Lecture 2018 ini senafas dengan tema-tema program Bentara Budaya dalam beberapa tahun terakhir. Tema ini didasari atas kekhawatiran akan keretakan bangsa. Bentara Budaya merumuskannya dalam tema "Bagimu Negeri – Kita Garuda" yang melandasi program 2017.

Tema program tahun 2018, yakni "Menerabas Cakrawala", merupakan lanjutan dari tema tahun sebelumnya. Di dalamnya terkandung semangat untuk meluaskan pemikiran, termasuk dalam kehidupan berbangsa. Tema tersebut mungkin menyemangati pula acara kuliah publik ini.

Bukan baru kali ini saja Koentjaraningrat Memorial Lecture digelar di Bentara Budaya. Sebelumnya, pada 2005, Bentara Budaya dan Forum Kajian Antropolgi Indonesia (FKAI) sudah bekerja sama menyelenggarakan acara serupa.

Bentara Budaya sebagai pelaksana visi kultural Harian *Kompas* berada dalam satu semangat dengan FKAI dalam usaha merawat kehidupan Indonesia yang multikuktural.

Frans Sartono

SEKAPUR SIRIH
KETUA FORUM KAJIAN ANTROPOLOGI INDONESIA

Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan

Assalamualaikum warahamatullahi wabarakatuh
Namo Buddhaya
Om Swastiastu
Salam sejahtera bagi kita semua

Terima kasih telah hadir memenuhi undangan mengikuti Koentjaraningrat Memorial Lecture, kuliah publik yang diselenggarakan untuk mengenang jasa-saja almarhum Prof Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia. Prof Koentjaraningrat adalah guru besar pertama bidang antropologi di Indonesia; ia yang sepanjang hayat telah berjuang mengembangkan ilmu tentang kebudayaan manusia ini di Universitas Indonesia dan berbagai perguruan tinggi negeri di berbagai penjuru Nusantara. Dapat dipastikan, sebagian besar pengajar dan peneliti senior, serta mereka yang saat ini menjadi guru besar antropologi di berbagai perguruan tinggi adalah anak-anak intelektual Prof Koentjaraningrat, Sang Guru yang telah meninggalkan kita pada 1999.

Koentjaraningrat Memorial Lecture atau KML kali ini adalah yang ke-15, setelah kuliah publik ini setiap tahun dilaksanakan secara berkelanjutan sejak 2004. Penyelengaranya adalah Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), organisasai nirlaba yang bertujuan ikut memajukan antropologi di luar dunia perguruan tinggi dan pemerintahan. Di Indonesia, sikap menghormati jasa para guru, termasuk guru besar, masih perlu terus ditumbuhkembangkan. Hal inilah yang membuat FKAI bertekad untuk terus menyelenggarakan acara ini. Semoga tradisi ini kelak dilanjutkan oleh para antropolog Indonesia generasi muda, yang hanya mengenal Prof Koentjaraningrat melalui tulisan-tulisannya yang kini telah menjadi bagian dari karya-karya klasik antropologi Indonesia.

Untuk pertama kali dalam sejarah penyelenggaraannya, KML tahun 2018 ini dihelat di dua kota berbeda. Setelah di Jakarta pada 19 Oktober, kuliah publik ini diselenggrakan pula di Yogyakarta pada 31 Oktober. Inilah yang menjadikan KML kali ini istimewa. Apalagi Yogya adalah kota yang memiliki makna khusus bagi Pak Koen, begitu kami, para mahasiswanya,

biasa memanggilnya, dulu. Yogya adalah kota tempat beliau dilahirkan pada 15 Juni 1923. Di Kota Gudeg ini pula beliau mengawali perjalanan intelektualnya dengan menjadi mahasiswa Fakutas Sastra Universitas Gadjah Mada pada akhir dekade 1940-an hingga 1950.

***

Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian,

Perkenankanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memungkinkan terlaksananya acara ini. Pertama-tama, terima kasih kepada Bentara Budaya, yang telah menyediakan ruang yang nyaman di Jakarta maupun di Yogyakarta.

Ucapan terima kasih juga perlu disampaikan kepada Indofood, khususnya kepada Bapak Franciscus Welirang, direktur utamanya. Sumbangan konsumsi yang beliau kirimkankan telah ikut memastikan tidak adanya peserta kuliah dan diskusi yang kelaparan. Ucapan terima kasih yang sama ingin pula saya tujukan kepada Bapak Theo Gazali dari PT Dua Kelinci, yang telah menyiapkan bagi kita semua oleh-oleh untuk nanti dibawa pulang.

Penyelenggaraan acara ini juga dimungkinkan berkat adanya donasi personal dari beberapa sahabat FKAI yang tak bersedia disebut namanya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Semoga kedermawanan Anda semua dibalas Tuhan berlipat ganda. Terakhir, ucapan terima kasih yang paling melimpah wajib saya sampaikan bagi para penggiat FKAI serta sahabat-sahabat di Bentara Budaya Jakarta dan Yogtakarta. Merekalah yang dengan penuh kesungguhan telah mencurahkan pikiran, tenaga, dan waktu demi terselenggaranya acara ini. Matur suwun, suksme, nuhun, mauliate godang.

***

Bapak-bapak., ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian,

Sejak awal merdeka, 1945, Indonesia sebagai negara dan bangsa telah berulangkali dihadapkan pada berbagai ancaman perpecahan. Salah satu yang pertama datang dari kelompok Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang memperjuangkan berdirinya Negara Islam Indonesia melalui gerakan pemberontakan bersenjata, antara 1945-1962. Usaha pengambilalihan kekuasaan secara inkonstitusional kembali dicoba Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui apa yang disebut sebagai Gerakan 30 September 1965, episode sejarah yang hingga hari ini masih pekat diliputi

berbagai misteri. Sejak zaman Orde Baru, ancaman perpecahan pun datang dari berbagai daerah. Meningkatnya kesadaran etnis dan rasa kedaerahan akibat tak kunjung terwujudnya kerataan kemakmuran dan keadilan di berbagai bidang, telah memunculkan gerakan, atau setidaknya wacana, di daearah-daerah tertentu untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah relatif kohesif di awal era reformasi, penyebarluasan kabar bohong dan ujaran kebencian, serta pengeksploitasian isu SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) yang oleh sementara politisi dalam kampanye politik dalam lima tahun terakhir, kembali memunculkan kekhawatiran sementara anak bangsa pada kemungkinan rontoknya integrasi nasional. Kekhawatiran kian menggelembung akibat kekhawatiran pada kemungkinan masih adanya para "penumpang gelap" dalam kegiatan politik di tingkat lokal maupun nasional. Mereka adalah kaum penganut faham politik yang berada di luar ideologi Pancasila yang telah disepakati para bapak bangsa.

Dalam kuliah umum ini, Prof Dr Heddy Shri Ahimsa-Putra akan menelaah tesis Prof Koentjaraningrat tentang mungkin atau tidaknya sebuah negara dengan warga yang multietnis serta majemuk agama dan keyakinannya dapat memperkuat kesatuan bangsa tanpa menghilangkan budaya (dan identitas lain) dari berbagai sukubangsanya. Guru besar antropologi Universitas Gadjah Mada ini juga akan mencoba menjawab pertanyaan, apakah ancaman terhadap integrasi nasional memang nyata ada atau sesungguhnya hanya ilusi akibat paranoia kolektif yang tengah melanda bangsa.

Semoga kuliah umum ini dapat ikut meluaskan cakrawala pengetahuan dan mencerahkan pikiran kita semua. Selamat berkuliah dan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, 19 Oktober 2018
Yogyakarta, 31 Oktober 2018

Muyawan Karim

RIWAYAT SINGKAT

KOENTJARANINGRAT

Koenjaraningrat adalah Guru Besar dalam ilmu antropologi Universitas Indonesia, Univeristas Gadjah Mada, Perguruan Tinggi Ilmu Militer, dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Lulus Sarjana Muda pada Universitas Gadjah Mada (1950), mendapat gelar MA dalam Antropologi dari Yale University (1956), dan Doktor Antropologi dari Universitas Indonesia (1958). Berbagai penghargaan telah dianugerahkan padanya atas pengabdiannya dalam pengembangan ilmu antropologi. Di antaranya, penghargaan ilmiah gelar doctor honoris causa dari Universitas Utrecht, 1976 dan Fukuoka Asian Cultural Price pada tahun 1995. Pak Koen juga mendapat penghargaan Satyalencana Dwidja Sistha dari Menhankam RI (1968 dan 1981).

Pak Koen, demikian ia disapa, merintis berdirinya sebelas jurusan antropologi di berbagai universitas di Indonesia. Ilmuwan yang mahir berbahasa Belanda dan Inggris ini juga tekun menulis. Beberapa karya tulisnya telah menjadi rujukan bagi dosen dan mahasiswa di Indonesia. Karyanya sampai sekarang meliputi lebih dari 80 buah buku dan karangan yang diterbitkan di dalam maupun luar negeri, dan diantaranya yang terpenting adalah *Villages in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1967), Metodologi Penelitian Masyarakat (LIPI, 1973), *Anthropology in Indonesia* (Leiden, KITLV, 1974), Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Gramedia, 1978), Sejarah Teori Antropologi Jilid I (Jakarta: UI Press, 1987), *dan* Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1993)

KULIAH UMUM

INTEGRASI NASIONAL DAN ANCAMAN YANG DIHADAPI

HEDDY SHRI AHIMSA-PUTRA
Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Gadjah Mada

I. PENGANTAR

Di tengah situasi dan kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini—persaingan untuk memperebutkan kursi presiden tahun 2019 yang semakin menguat, semangat "Ganti Presiden" yang semakin menggebu, kebiasaan saling mencela dan ujaran kebencian yang semakin merajalela, pembesaran isu tenaga asing, kesenjangan ekonomi dan penistaan agama—permintaan para mantan mahasiswa Koentjaraningrat yang tergabung dalam FKAI pada saya untuk mengisi "Koentjaraningrat Memorial Lecture XV" kali ini telah menerbangkan ingatan saya kembali ke masa-masa tahun 1970-1980an, ketika ilmu-ilmu sosial tengah kian menanjak popularitasnya, dan peran ilmuwan sosial seperti Koentjaraningrat dipandang semakin penting dalam penyelesaian berbagai masalah sosial-budaya di Indonesia.

Mereka yang cukup mengenal tulisan-tulisan almarhum Koentjaraningrat mengenai antropologi tentu akan sepakat bahwa salah satu masalah sosial-budaya di Indonesia yang menjadi perhatian utama beliau—yang saya kira sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi di masa itu—adalah masalah integrasi nasional. Hampir empat puluh tahun telah berlalu semenjak Koentjaraningrat mengemukakan gagasannya mengenai sumbangan antropologi bagi penyelesaian masalah integrasi nasional. Meskipun demikian, integrasi nasional masih merupakan salah satu masalah utama Indonesia di era milenial ini. Pernyataan "NKRI Harga Mati" yang sering kita dengar merupakan ekspresi yang jelas dari kekhawatiran akan terjadinya perpecahan dalam masyarakat, yang akan membahayakan keutuhan NKRI.

Berbagai pertanyaan yang muncul kemudian adalah: masih relevankah pemikiran-pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional untuk Indonesia di abad yang lalu, untuk menyelesaikan masalah yang sama di

masa kini, di abad yang berbeda? Jika masih, di mana letak relevansi tersebut? Jika tidak, gagasan seperti apa yang dapat kita kemukakan untuk memahami dan, jika mungkin, menyelesaikan berbagai persoalan yang mengancam integrasi nasional? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan saya coba jawab dalam makalah ini.

II. KOENTJARANINGRAT DAN MASALAH INTEGRASI NASIONAL

Jika kita simak berbagai tulisan Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional, terlihat dengan cukup jelas perbedaan-perbedaan pemikiran beliau di akhir tahun 1960an dengan pemikiran beliau di tahun 1980-an. Fakta ini mencerminkan paling tidak dua hal. Pertama, pemikiran Koentjaraningrat yang semakin tajam dan rinci dalam me-lihat masalah integrasi nasional, dan kedua, masalah integrasi nasional itu sendiri yang juga tampak lebih rumit, lebih kompleks, seperti halnya masyarakat Indonesia itu sendiri yang terus tumbuh dan berkembang.

Secara garis besar pemikiran Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional dapat kita bagi dalam tiga periode, yaitu masa tahun 1960-an, masa tahun 1980-an dan masa tahun 1990-an.

1. MASA 1960-1970-AN

Dalam karyanya yang sangat penting mengenai arti antropologi untuk Indonesia -yang mungkin tidak lagi banyak dibaca pelajar antropologi masa kini-, yaitu *Arti Antropologi Untuk Indonesia Masa Ini* (1969), beliau menulis tentang "Tugas-tugas Peneliti-an Antropologi Indonesia", dan pada urutan pertama di situ beliau menempatkan "Peneltian-penelitian dalam Rangka Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia". Hal ini menunjukkan bahwa bagi Koentjaraningrat "Pembentukan Negara Kesatuan Indonesia" merupakan masalah terpenting yang perlu diselesaikan melalui penelitian-penelitian antropologi. Beliau katakan bahwa

> *"Unsur-unsur penting dalam usaha dan proses membangun Negara kesatuan yang kuat dan sentausa adalah saling pengertian, integrasi dan asimilasi antara suku-suku-bangsa dan antara golongan-golongan di Indonesia".*

> *"Penelitian-penelitian antropologi dapat membantu dalam hal memperbesar pengertian antara suku-bangsa, dengan penelitian mengenai masyarakat dan kebudayaan aneka warna suku-bangsa dengan metode-metode* fieldwork *yang tajam dan mendalam, serta dengan menyusun bahan yang terkumpul dalam laporan-laporan etnografi".*
>
> *"Penelitian antropologi dapat pula membantu dalam hal memperbesar pengertian antara golongan atau lebih konkrit pengertian terhadap golongan penduduk dan warga Negara keturunan Cina, golongan minoriteit yang terpenting diantara kedua golongan minoriteit yang lain, ialah Arab dan Indo*" (Koentjaraningrat, 1969: 113-114).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa menurut Koentjaraningrat masalah pokok dalam pembentukan Negara Kesatuan Indonesia adalah *kurangnya saling pengertian* di antara warga berbagai sukubangsa Indonesia mengenai budaya suku-suku yang lain. Oleh karena itu upaya yang diperlukan adalah membangun saling pengertian di antara mereka. Jika saling pengertian ini telah terbentuk maka akan terjadi integrasi dan asimilasi. Begitu kurang lebih pandangan Koentjaraningrat.

Tentu kita dapat bertanya lebih lanjut, "saling pengertian" seperti apa yang dimaksud oleh Koentjaraningrat? Mengenai hal ini beliau tidak menjelaskan lebih lanjut. Di masa lalu, pandangan Koentjaraningrat tersebut tampaknya sudah dapat diterima oleh ilmuwan sosial yang lain, terbukti tidak muncul diskusi dan perdebatan mengenai pandangan Koentjaraningart tersebut. Untuk masa kini, pandangan Koentjaraningrat terasa terlalu sederhana, karena kurang memperhatikan sejumlah faktor yang lain, yang sebenarnya lebih relevan atau lebih jelas keterkaitannya degan situasi dan kondisi di masa kini.

2. MASA 1980-AN

Hampir lima belas tahun kemudian Koentjaraningrat mengemukakan kembali pemi-kirannya mengenai integrasi nasional dalam sebuah artikel yang dimuat dalam sebuah buku mengenai antropologi terapan yang dieditnya. Di sini pandangan Koentjaraning-rat mengenai masalah integrasi nasional sudah lebih rinci. Ada empat masalah yang di-identifikasinya, yaitu:

(a) Masalah mempersatukan aneka-warna suku-bangsa; (b) Masalah hubungan antara umat agama; (c) Masalah hubungan mayoritas-minoritas; (d) Masalah integrasi kebudayaan-kebudayaan Irian Jaya dan Timor Timur dengan kebu-dayaan Indonesia

a. Masalah mempersatukan aneka-warna suku-bangsa

Persatuan di antara aneka-warna sukubangsa di Indonesia dipandang oleh Koentja-raningrat sebagai salah satu masalah integrasi nasional. Pandangan ini muncul karena di sejumlah negara muncul gerakan-gerakan untuk memisahkan diri, membentuk negara baru sendiri, atas dasar kesukubangsaan, sehingga masalah yang dihadapi di sini sebenarnya adalah masalah hubungan antar sukubangsa, yaitu: perlakuan satu suku-bangsa yang satu -mungkin yang mayoritas atau yang tengah berkuasa- terhadap su-kubangsa yang lain.

Dalam anggapan Koentjaraningrat, perlakuan-perlakuan atau interaksi sosial satu sukubangsa dengan sukubangsa yang lain tersebut didasarkan pada "stereotipe", sehingga masalah integrasi di sini adalah "masalah merubah prasangka stereotipe etnik antara warga sukubangsa berlainan, yang dalam persaingan mengejar kesempatan bekerja serta pendidikan yang terbatas dapat menimbulkan sikap tegang dan bermusuhan" (Koentjaraningrat, 1982: 348).

Untuk "membina persatuan bangsa Indonesia yang berasal dari berbagai sukubangsa" tersebut, yang diperlukan kemudian adalah "pengembangan Kebudayaan Nasional Indonesia", dan ini menyangkut "masalah kepribadian nasional". Masalah kepribadian nasional "tidak hanya langsung mengenai identitas kita sebagai bangsa, tetapi juga menyangkut soal motivasi kita untuk bersama bersusah payah mengorbankan banyak harta dan tenaga untuk membangun" (p.351).

b. Masalah hubungan antara umat agama

Menurut Koentjaraningrat hubungan antar umat agama di Indonesia menyimpan potensi konflik, karena hubungan ini "juga dilatarbelakangi oleh sikap prasangka stereotipe etnik dan dijiwai oleh suasana persaingan yang tajam", dan "bisa bersifat ekstrem, dan dijiwai oleh emosi yang tak rasional" (p.355). Berkenaan dengan masalah ini, Koentjaraningrat berpendapat

bahwa hubungan antar umat agama "yang paling baik... adalah apabila mereka itu bisa hidup bersama dengan sikap saling bertoleransi", dan sikap ini akan muncul jika "mereka saling memahami asas-asas agama dari pihak yang lain" (p.356), atau paling tidak mereka "bisa hidup berdampingan dengan sikap bertoleransi, tanpa banyak saling mencampuri urusan masing masing" (p.357)

c. Masalah hubungan mayoritas-minoritas

Yang dimaksud oleh Koentjaraningrat dengan golongan minoritas di sini adalah,

"warganegara-warganegara Indonesia keturunan Cina" (p.357), dan mayoritasnya tentu saja adalah warganegara Indonesia "pribumi". Dalam hubungan antara orang Tionghoa di Indonesia dengan penduduk pribumi, Koentjaraningrat menengarai bahwa akibat ke-bijakan pemerintah kolonial Belanda, hubungan mereka dengan penduduk pribumi ku-rang begitu baik setelah kemerdekaan, karena "penduduk pribumi sudah terlanjur mempunyai sikap berprasangka terhadap orang Tionghoa yang didasarkan stereotipe etnik dan suatu sikap curiga terhadap loyalitas nasional dari orang Tionghoa Indonesia, karena sikap acuh tak acuh dari sebagian besar mereka itu terhadap perjuangan orang Indonesia selama zaman revolusi" (p.362).

Di mata Koentjaraningrat masalah hubungan minoritas dengan mayoritas ini, teruta-ma minoritas Tionghoa, "berbeda dengan masalah hubungan antara warganegara dari sukubangsa yang berbeda". Oleh karena itu, perlu langkah yang lebih jauh lagi, yaitu "menghilangkan identitas Cina dari penduduk Tionghoa di Indonesia" (p.364). Pernyataan ini tentu cukup mengejutkan jika kita tempatkan dalam situasi dan kondisi Indonesia yang sekarang, tetapi yang dimaksud oleh Koentjaraningrat dengan hal itu adalah, "integrasi nasional, terutama integrasi dalam sektor ekonomi dan sosial dan integrasi kebudayaan (khususnya bahasa dan kesenian) ke dalam kebudayaan sukubangsa sekelilingnya. Kekhususan dalam kebudayaan etnik Tionghoa dapat dipertahankan dalam gaya hidup dan keagamaannya (Kong-Fu-Tsu atau Budha-Cina)." (p.364)

Berkenaan dengan identitas kebudayaan Cina ini Koentjaraningrat berpendapat, bahwa "*Identitas kebudayaan dalam arti sepenuhnya tak dapat dipertahankan pada sukubangsa Tionghoa di Indonesia, seperti misalnya*

identitas etnik pada sukubangsa yang lain. Hal ini karena berbeda dengan sukubangsa di Indonesia yang lain". Apa perbedaan tersebut? "...lokasi dari kebudayaan Cina yang harus menjadi pusat orientasi untuk identitas tersebut berada di luar wilayah negara Indonesia. Mempertahankan identitas kebudayaan Cina pada sukubangsa Tionghoa di Indonesia akan menimbulkan masalah-masalah politik yang membahayakan" (p.364).

Pendapat Koentjaraningrat ini mungkin akan mengejutkan sebagian dari kita karena terlihat berlawanan dengan apa yang terjadi sekarang. Perlu diingat, bahwa pernyataan Koentjaraningrat tersebut dikemukakan pada awal tahun 1980an, ketika persatuan dan kesatuan nasional belum sepenuhnya stabil, dan ingatan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di tahun 1950-1960an masih sangat kuat. Penafsiran atas pernyataan Koentjaraningrat tersebut perlu disertai dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi dan kondisi sosial-ekonomi-politik-kebudayaan di masa itu, tentang posisi orang Tionghoa dalam masyarakat Indonesia—terutama di Jawa—dan posisi Koentjaraningrat sebagai ilmuwan sosial-budaya, gurubesar antropologi di sebuah universitas negeri terkemuka, serta peneliti senior yang berpengaruh di lembaga ilmu pengetahuan milik negara.

d. Masalah integrasi kebudayaan-kebudayaan Irian Jaya dan Timor Timur dengan kebudayaan Indonesia

Meskipun mencantumkan nama Timor Timur pada judul sub-bab tulisannya, tetapi Koentjaraningrat ternyata tidak membahas sama sekali tentang integrasi Timor Timur. Saya tidak tahu apa yang membuat Koentjaraningrat tidak melakukannya, padahal Timor Timur belum lepas dari Indonesia ketika itu. Pembicaraan beliau hanya mengenai masalah integrasi Irian Jaya, yang kini disebut "Papua".

Menurut beliau, secara politik "masalah integrasi Irian sudah tercapai, dalam arti bahwa Irian Jaya sudah menjadi bagian integral dari negara Indonesia; integrasi ekonomi kini sudah selesai, namun integrasi kebudayaan belum tercapai", dan ini dapat menimbulkan jarak sosial "antara penduduk Irian Jaya dengan penduduk Indonesia lainnya, yang mungkin bisa mempunyai akibat negatif lagi terhadap integrasi politik yang sudah tercapai itu" (p.366-367)

Ada satu ciri umum di kalangan penduduk Irian Jaya, menurut Koentjaraningrat, yang penting untuk diperhatikan, yaitu "cita-cita penduduk Irian untuk membentuk suatu masyarakat atau suatu negara sendiri, bebas dari dominasi orang lain yang tidak mereka anggap sebagai keturunan dari nenek moyang mereka, ialah ciri kepekaan terhadap "gerakan pemimpin adil". Ciri ini erat sangkut-pautnya dengan "konsep tentang suatu negara Irian yang merdeka", oleh karena itu Koentjaraningrat menyimpulkan bahwa "hal itu dapat mengganggu proses integrasi Irian Jaya ke dalam persatuan nasional In-donesia" (p.368).

Untuk mengatasi masalah integrasi nasional di Irian Jaya, Koentjaraningrat menge-mukakan bahwa di situ perlu diwujudkan pemerintahan yang "dapat dianggap oleh penduduknya sebagai suatu pemerintah sendiri", "suatu pemerintah yang tidak mereka pandang asing, yang tidak mereka curigai dan yang mereka anggap adil seperti pemimpin adil yang mereka idam-idamkan itu". Pemerintahan tersebut harus berusaha membuat Irian Jaya (Papua) menjadi "propinsi yang dalam segala lapangan, bidang dan lapangan, bidang dan lapisan kehidupan ekonomi, profesional, organisasi sosial dan administrasi pemerintahan dapat diurus oleh putra Irian sendiri". Selain itu, pemerintah Indonesia harus bersaing dengan pemerintah Papua Nugini dalam pengaturan ekonomi dan administrasi, yang ketika itu masih dibina dan dilindungi oleh Australia (Koentjaraningrat, 1982: 368-369).

3. MASA 1990-AN

Memasuki tahun 1990, minat Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional tidak mengendor. Mungkin Koentjaraningrat adalah satu-satunya ilmuwan sosial Indonesia yang paling konsisten menaruh perhatian pada masalah integrasi nasional. Hal ini tidak lepas dari hasil pengamatannya atas berbagai peristiwa politik di beberapa negara. Kata Koentjaraningrat, "Suatu gejala penting yang terdapat dalam berbagai peris-tiwa di dunia selama dua dasawarsa terakhir adalah timbulnya gerakan-gerakan etnik, dengan adanya sukubangsa-sukubangsa dan golongan-golongan etnik yang menuntut ekonomi yang lebih besar -ataupun kemerdekaan- dari negara tempat mereka bermu-kim sebagai warga negaranya" (1993: 1). Oleh karena itu, Koentjaraningrat kemudian juga tertarik masalah hubungan antar sukubangsa atau etnisitas (kesukubangsaan).

"*Kajian tentang kesukubangsaan bahkan lebih penting, karena sebagian besar dari negara-negara di dunia bersifat multietnik. Di antara sekitar 175 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, hanya 12 negara yang penduduknya kurang-lebih homogen. Karena itu jelas,"* tandas Koentjaraningrat*, "bahwa masalah kesukubangsaan merupa-kan masalah global*" (1993: 3).

Tidak mengherankan apabila pandangan Koentjaraningrat mengenai masalah integrasi nasional terlihat menukik lebih dalam. Hal ini juga dimungkinkan oleh adanya kesempatan untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut secara komparatif dan lebih mendalam. Sebagaimana telah saya sampaikan, bagi Koentjaraningrat masalah integrasi nasional adalah masalah hubungan antar sukubangsa. Lantas, apa fokus perhatian Koentjaraningrat dalam penelitian beliau mengenai hubungan antar sukubangsa tersebut? Tulis beliau, "saya memfokuskan perhatian pada ada atau tidaknya kemungkinan bahwa negara yang multietnik memperkuat kesatuan bangsa tanpa menghilangkan kebudayaan-kebudayaan sukubangsa, maka kebijakan-kebijakan bu-daya apakah yang harus diupayakan oleh negara multietnik untuk mempertahankan kesatuan nasional?" (1993: 3).

Pernyataan ini menunjukkan dua hal yang menjadi perhatian Koentjaraningrat. Pertama masalah integrasi nasional dan kedua sumbangan pemikiran antropologi untuk memperkuat integrasi tersebut. Berkenaan dengan yang pertama, Koentjaraningrat berpendapat ada banyak negara yang multietnik, yang warganya terdiri dari berbagai macam sukubangsa. Negara seperti ini tentunya menghadapi masalah mempersatukan berbagai macam sukubangsa tersebut di bawah payung sebuah sistem politik yang di-akui dan diterima bersama. Dalam proses penyatuan tersebut Koentjaraningrat -secara implisit- berpendapat bahwa budaya-budaya sukubangsa tersebut sebaiknya tidak dihi-langkan. Jika demikian, bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan?

Sehubungan dengan itu, muncul persoalan kedua, yang lebih berkaitan dengan peran antropologi untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Di sini Koentjara-ningrat secara implisit berpendapat bahwa antropologi perlu memberikan sumbangan untuk penyelesaian masalah itu pada tataran kebijakan, sehingga muncullah pertanyaan berikutnya: kebijakan seperti apa yang harus dibuat oleh negara dalam proses

penyatuan berbagai sukubangsa tersebut dalam sebuah negara? Jika pertanyaan pertama dapat dijawab, maka dengan sendirinya pertanyaan kedua juga akan terjawab.

Pandangan yang mendasari penelitian Koentjaraningrat mengenai integrasi sosial adalah bahwa "Masalah kebhinekaan sukubangsa dan kesatuan nasional di Indonesia telah menunjukkan kepada kita bahwa suatu negara berkembang besar yang multietnik memerlukan suatu kebudayaan nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas nasional dan solidaritas nasional di antara warganya.." (1993: 29). Akan tetapi pandangan itu perlu diuji lagi, dan Koentjaraningrat mencoba melakukan studi perbandingan deng-an India, sebuah negara yang multietnik juga.

a. Sejarah Nasional yang Panjang

Dari studi perbandingan yang terbatas itu, Koentjaraningrat menyimpulkan, "Kajian ini [studi perbandingan India dan Indonesia] telah menunjukkan bahwa suatu sejarah nasional yang panjang dengan kasus-kasus kesatuan nasional, integrasi sukubangsa, dan toleransi keagamaanlah yang membuat rakyat dan para pemimpin negara-negara multietnik mengacu dan meningkatkan integrasi nasional, selanjutnya mencegah kon-flik etnik dan agama, dan merupakan suatu faktor penting untuk meningkatkan kesatu-an nasional dan solidaritas nasional" (1993: 50).

Apa saran Koentjaraningrat berkenaan dengan butir ini? Tidak begitu jelas. Tampaknya beliau tidak mempunyai gambaran atau pemikiran tentang bagaimana "sejarah nasional yang panjang tersebut dapat terbentuk, dan jika ada bagaimana menjadikannya sebagai salah satu faktor yang dapat memperkuat integrasi nasional.

b. Bahasa Nasional dan Identitas Nasional

Berkenaan dengan Bahasa Nasional dan identitas nasional ini Koentjaraningrat mengajukan proposisi: (1) "bahwa pembentukan suatu kebudayaan nasional yang kuat meningkatkan identitas nasional"; (2) "bahwa adanya suatu bahasa nasional mengin-tensifkan kesatuan nasional". Proposisi ini kemudian beliau uji kebenarannya dengan mempelajari dua negara dengan sejarah nasional yang berbeda dan hasil yang berbeda, yaitu Belgia dan Yugoslavia. Masing-masing negara memiliki beberapa persamaan

dengan Indonesia, namun Belgia dapat tetap bertahan sebagai sebuah negara, sedang Yugoslavia kemudian terpecah-pecah menjadi beberapa negara.

Proposisi tersebut sangat relevan dengan kondisi integrasi nasional Indonesia di masa-masa yang lalu, yang memang mengkhawatirkan, karena belum cukup kuat, dan Indonesia ternyata mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat, yaitu memperkuat bahasa nasional, bahasa Indonesia, yang sekaligus juga menjadi identitas nasional. Dari hasil kajian atas negara Yugoslavia, yang kini telah bubar, Koentjaraningrat meninggalkan pesan mengenai tiga hal yang perlu dihindari agar disintegrasi tidak terjadi, yaitu, pertama, menghindari "upaya memaksakan konsep mengenai nilai-nilai budaya kepada penduduk yang kita pandang "terbelakang". Pesan ini tampaknya beliau sampaikan sehubungan dengan masih terjadinya pemaksaan nilai-nilai budaya tertentu pada suku-sukubangsa yang dianggap masih terbelakang di Indonesia, yang kemudian ditafsirkan sebagai pemaksaan nilai budaya milik sukubangsa yang sedang berkuasa atau yang mayoritas.

Kedua, mendiskriminasi sesama warga bangsa Indonesia. Menurut Koentjaraningrat hal ini masih cukup sering terjadi, terutama terhadap warganegara Indonesia keturunan Tionghoa. Ketiga, membiarkan terjadinya proses "kesenjangan antara daerah yang cepat maju dengan yang lambat maju" menjadi "terlalu besar" (1993: 68). Melebarnya kesenjangan antardaerah ini akan dapat ditafsirkan sebagai kurangnya perhatian dan upaya pemerintah pada kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan dan kemandirian berbagai kelompok dan komunitas di Indonesia, yang akhirnya dapat berujung pada upaya melepaskan diri dari NKRI.

c. Peran Pemimpin dan Tokoh Masyarakat

Berkenaan dengan peran pemimpin dan tokoh masyarakat dalam penguatan integrasi nasional, ada pernyataan Koentjaraningrat yang menarik, yang saya kira sangat relevan dengan situasi di Indonesia sekarang. Beliau menulis, "Dalam pembahasan mengenai ketakutan yang universal terhadap dominasi permanen oleh sukubangsa-su-kubangsa atau bangsa lainnya, suatu pertanyaan bisa muncul: dalam suatu masyarakat multietnik, sebenarnya kategori sosial manakah yang merasakan ancaman itu?".

Menurut beliau mereka adalah "para pemimpin, para ahli politik dan kaum intelektual terkemuka, yang dapat mengekspresikan ketakutan-ketakutan mereka melalui media massa" (1993: 57). Eskpresi ketakutan ini bisa merupakan akibat dari situasi dan kondisi yang nyata ada dalam masyarakat, tetapi bisa juga merupakan rekayasa yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan politis tertentu, yang dapat melemahkan integrasi nasional.

Oleh karena itu, Koentjaraningrat berkesimpulan bahwa "walaupun keadaan tidak adanya toleransi etnik, linguistik, agama, ras atau kasta dapat menghambat integrasi dalam suatu masyarakat multietnik, kemauan dari sebagian terbesar para pemimpin, ahli politik, kaum intelektual dan masyarakat pers untuk tetap bersatulah yang sebenar-nya membuat suatu negara bersatu" (1993: 57). Kesimpulan ini sangat relevan dengan apa yang sering kita dengar dari televisi atau baca di suratkabar.

Ketika politisi, ulama, pengamat politik berbicara mengenai situasi dan kondisi di Indonesia, dan mereka memiliki agenda politik tertentu, maka komentar-komentar mereka seringkali adalah rekayasa tafsiriah (interpretif), yang ditujukan bukan untuk menyelesaikan masalah tetapi untuk menimbulkan keresahan masyarakat, ketakutan sosial. Ketakutan sosial ini diharapkan akan dapat memunculkan kondisi sosial-psikologis tertentu yang akan memudahkan tercapainya tujuan politik mereka. Di sisi lain, tanpa mereka sadari, hal itu telah membuat integrasi nasional tergerus.

4. SIMPULAN

Paparan atas perkembangan perhatian Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional di atas menunjukkan kepada kita beberapa hal. Pertama, perhatian Koentjaraningrat terhadap masalah integrasi nasional tidak pernah surut semenjak tahun 1960-an. Hal ini setidaknya mencerminkan nasionalisme dan perhatian beliau yang besar terhadap keberlangsungan NKRI. Kedua, beliau ingin menunjukkan bahwa ilmu sosial, khususnya antropologi, dapat memberikan sumbangan pemikiran yang penting dan nyata untuk penguatan persatuan dan kesatuan dalam sebuah negara bangsa. Ketiga, secara tersirat beliau menyampaikan pesan bahwa ilmuwan sosial di negeri yang tengah berkembang seperti Indonesia, sebaiknya memainkan peran aktif dalam memba-ngun negeri dengan menyumbangkan saran dan pemikiran untuk menyelesaikan ber-bagai masalah sosial-budaya di situ. Keempat, pemikiran tentang masalah sosial-

buda-ya perlu dikembangkan melalui perenungan dan penelitian yang tekun dan serius, sebagaimana telah beliau tunjukkan.

Sementara itu, telaah atas pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional menunjukkan hal yang lain. Pertama, analisis beliau mengenai masalah tersebut terli-hat semakin rinci, semakin dalam. Kedua, pemikiran beliau sangat menekankan pada pentingnya pengembangan atau pembentukan kebudayaan nasional untuk penguatan identitas nasional, yang dapat memayungi berbagai kebudayaan etnis atau daerah. Ketiga, pemikiran beliau kurang menampilkan variabel-variabel yang lebih "materialistis", yang dapat memengaruhi integrasi nasional. Keempat, pemikiran beliau juga mencer-minkan pandangan yang memperlakukan kebudayaan sebagai suatu entitas dengan batas-batas yang cukup jelas satu dengan yang lain, yang pendukung-pendukungnya kurang memiliki relasi dengan pendukung kebudayaan yang lain. Model masyarakat yang beliau sajikan adalah model masyarakat 'plural', *plural society*, sebagaimana yang digambarkan oleh Furnivall (1939). Kelima, pemikiran Koentjaraningrat memper-tentangkan konsep 'integrasi nasional' dengan konsep disintegrasi seperti hitam dan putih dengan garis batas yang tegas, sementara realitas sosialnya tidak demikian. Keenam, Koentjaraningrat lebih memerhatikan persoalan bagaimana memperkuat integrasi nasional, dan kurang memerhatikan hal-hal yang dapat melemahkan integrasi tersebut, padahal menghilangkan faktor yang melemahkan ini juga berarti menguatkan integrasi sosial itu sendiri. Ketujuh, Koentjaraningrat menggunakan istilah "masalah inte-grasi nasional" untuk menampung berbagai macam gejala dan persoalan yang sebenarnya tidak dapat ditempatkan dalam satu kategori. Pada satu waktu, "masalah integrasi nasional" tersebut dimaknai sebagai bidang-bidang di mana terdapat relasi sosial yang kurang bagus antarkategori sosial; pada waktu yang lain, "masalah" tersebut adalah faktor-faktor yang menghambat integrasi nasional; pada waktu yang lain lagi, "masalah" tersebut dimaknai sebagai faktor-faktor yang mendorong terjadinya integrasi nasional.

Corak pemikiran seperti di atas tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya, tetapi kekurangannya lebih banyak daripada kelebihannya. Pertama, aspek material kebudayaan yang mempunyai potensi lebih besar untuk menguatkan integrasi sosial terabai-kan, sehingga strategi kebudayaan yang disarankan terasa kurang membumi, kurang mudah

dilaksanakan. Kedua, kemungkinan dibentuknya relasi-relasi sosial baru untuk mengubah corak sosial masyarakat plural (majemuk) melalui strategi kebudayaan yang lebih menekankan pada aspek infrastruktur kurang mendapat perhatian, sehingga potensinya untuk menguatkan integrasi sosial terabaikan. Ketiga, Koentjaraningrat belum pernah -setahu saya- membicarakan tentang apa yang beliau maksud sebagai íntegrasi nasional'dan disintegrasi nasional', sehingga muncul model hitam-putih untuk me-mandang fenomena disintegrasi dan integrasi sosial, yang kurang dapat menampilkan situasi dan kondisi sosial yang bersifat relatif. Akibatnya, strategi penguatan integrasi nasional yang disarankan kurang komprehensif. Keempat, analisis atas "masalah integrasi nasional" menjadi kurang tajam, sehingga usulan untuk penyelesaiannya menjadi kurang tajam juga dan kurang komprehensif. Kelemahan-kelemahan ini tidak berarti bahwa pemikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional di Indonesia sudah ti-dak relevan lagi. Tidak begitu. Beberapa butir pemkiran beliau menurut saya masih relevan, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan nasional.

III. INTEGRASI NASIONAL INDONESIA: MASA 2010-AN

Sehubungan dengan beberapa kelemahan di atas di sini saya menawarkan cara pandang yang berbeda mengenai masalah integrasi nasional, agar masalah ini dapat dipahami dengan lebih baik dan lebih mudah diselesaikan. Bagaimanapun juga perlu diingat bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami banyak perubahan, sehingga masalah integrasi nasional di masa kini juga sudah berbeda dengan masa empat puluh tahun yang lalu.

Dalam konteks Indonesia, integrasi nasional dapat kita definisikan sebagai situasi di mana segenap anak bangsa dan kolektivitas yang mereka bentuk tetap sepakat berada dalam sebuah negara kesatuan, NKRI, sedang disintegrasi nasional adalah situasi di mana sebagian anak bangsa dan kolektivitas yang mereka bentuk tidak lagi sepakat untuk tetap berada dalam satu negara kesatuan NKRI, dan mereka yang tidak sepakat tersebut ingin mendirikan sebuah negara baru, yang terpisah dari NKRI.

Contoh yang paling kongkrit dari kasus disintegrasi nasional adalah bubarnya Uni Soviet dan pecahnya Yugoslavia menjadi negara-negara yang lebih kecil. Pertanyaan-nya kemudian adalah apakah Indonesia sekarang

berada dalam situasi yang mendekati kasus Yugoslavia atau Uni Soviet? Saya pribadi tidak merasakannya demikian. Akan tetapi, tidak ada jeleknya untuk selalu waspada akan kemungkinan terjadinya hal yang sama di Indonesia.

Jika kita sepakat dengan definisi di atas, pertanyaannya kemudian adalah: apakah integrasi nasional di Indonesia sekarang tengah terancam? Jika "Ya", dari mana da-tangnya ancaman tersebut? apa saja ancaman tersebut? Jika "Tidak", bagaimana kita sebaiknya memandang dan menafsirkan berbagai wacana yang terasa begitu heboh di media massa dan media sosial?

Kira-kira dari mana datangnya kemungkinan terjadinya disintegrasi Indonesia? Di masa Orde Baru kemungkinan tersebut datang dari daerah Aceh dan dari daerah Papua. Namun sekarang, kita—atau paling tidak saya—merasa bahwa upaya sebagian warga di Aceh untuk memisahkan dari dari NKRI dan membentuk sebuah negara sendiri sudah tidak sekuat dulu lagi. Memang masih ada trauma, perasaan tidak puas atau tidak suka kepada apa yang ada di sana sekarang, akan tetapi perlawanan bersenjata sebagaimana dulu terjadi sudah jauh berkurang. Demikian pula yang terjadi di Papua. Jumlah warga dan kelompok-kelompok yang anti terhadap Indonesia tampaknya sema-kin berkurang.

Jika memang demikian, berarti integrasi nasional di Indonesia sudah lebih baik dari-pada di masa Orde Baru? Ataukah, sekarang muncul ancaman terhadap integrasi nasi-onal dalam bentuk baru? Atau, ada kekeliruan dalam pandangan kita mengenai apa yang sebetulnya terjadi sekarang ini?

Masalah integrasi nasional, menurut hemat saya, dapat kita maknai sebagai masa-lah bagaimana memperkuat integrasi sosial dalam sebuah negara agar tidak muncul keinginan sebagian warganegara untuk memisahkan diri dan membentuk sebuah negara baru. Jika kita sepakat dengan pemaknaan ini, hal itu berarti bahwa integrasi nasional di sebuah negara dapat kita tempatkan di antara dua kutub: kutub integrasi dan kutub disintegrasi. Dengan demikian situasi dan kondisi integrasi sosial di negara terse-but dapat dilihat sebagai bandul jam yang bergerak ke kiri dan ke kanan. Pada suatu periode tertentu bandul integrasi bergerak ke kanan, menuju integrasi yang kuat, pada periode yang lain bandul tersebut bergerak ke kiri, menuju ke arah disintegrasi.

Berdasarkan pada sejumlah indikator, kita kemudian dapat membuat skala penilaian dengan angka mulai dari nol sampai sepuluh. Ketika bandul

integrasi bergerak ke arah kanan dan mencapai angka sepuluh, hal itu berarti bahwa situasi dan kondisi integrasi nasional sangat bagus, sangat kuat, tetapi ketika bandul integrasi bergerak ke arah kiri dan mendekati angka nol, hal itu berarti bahwa situasi dan kondisi integrasi nasional semakin memburuk, yang dapat berujung pada disintegrasi. Model bandul jam untuk memahami integrasi nasional ini menurut hemat saya lebih sesuai dengan kenyataan yang kita hadapi. Model tersebut memungkinkan kita melihat dari perspektif makro atau nasional, tetapi tetap sensitif atau waspada terhadap perubahan di tingkat mikro, yaitu di tingkat daerah dan komunitas-komunitas atau kelompok-kelompok.

1. INTEGRASI NASIONAL INDONESIA YANG MENGUAT

Dengan model di atas, pertanyaan yang muncul kemudian adalah: bagaimana situasi dan kondisi integrasi nasional di Indonesia di masa kini? Mendekati kutub yang ma-na? Berada di angka berapa? Jika saya diminta menilai, maka saya akan memberi nilai 8 untuk situasi integrasi nasional Indonesia saat ini. Belum sampai 9 atau "sangat baik" memang, tetapi sudah bagus. Mengapa nilai 8? Apa dasar penilaian tersebut?

Ada beberapa indikator yang menunjukkan hal tersebut. Berikut adalah indikator-indikator tersebut dan penjelasannya.

1. Surutnya Gerakan Separatis (di Aceh dan di Papua)

Sebagaimana kita ketahui, di daerah Aceh kini telah tercipta suasana yang lebih damai, lebih baik dibandingkan dengan situasi di masa Orde Baru ketika daerah Aceh menjadi Daerah Operasi Militer. Gerakan untuk memisahkan diri boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Demikian pula halnya di Papua. Meskipun masih ada kelompok-kelompok yang melakukan protes dan penyerangan, namun jumlahnya semakin menyusut, dan situasi sudah lebih aman. Dua kawasan inilah yang selama ini selalu diberitakan sebagai kawasan yang sebagian warganya ingin mendirikan negara baru, lepas dari NKRI.

Semakin menyusutnya upaya sebagian warga di Aceh dan di Papua untuk memisahkan diri dari NKRI merupakan indikator yang paling jelas dari semakin melemahnya ancaman diisintegrasi, yang berarti juga semakin

menguatnya integrasi sosial, nasional di kawasan tersebut. Situasi dan kondisi ini tampaknya akan semakin membaik di masa-masa yang akan datang, jika tidak ada proses-proses sosial yang menghalangi atau mengganggunya.

2. Meningkatnya Sarana Transportasi dan Hubungan Antarpulau, Antaretnis

Jika kita sering bepergian di Indonesia, di masa lalu dan di masa kini, maka kita tentu merasakan perubahan-perubahan yang besar dan cepat di bidang perhubungan. Perkembangan teknologi transportasi dan deregulasi penerbangan telah melahirkan perusahaan-perusahaan penerbangan swasta nasional yang sangat penting perannya dalam integrasi nasional. Sayang sekali faktor ini tidak disinggung sama sekali oleh Koentjaraningrat dalam telaahnya atas integrasi nasional di Indonesia. Padahal, salah satu tolok ukur yang paling jelas dan mudah dari integrasi nasional adalah meningkatnya frekuensi interaksi kooperatif (bukan interaksi konfliktif) di antara warga atau ke-lompok anak bangsa.

Meningkatnya frekuensi interaksi antarwarga Indonesia ini terlihat pada meningkat-nya jumlah perusahaan penerbangan swasta nasional dan pesatnya peningkatan jalur-jalur penerbangan baru yang menghubungkan berbagai kota di Indonesia, yang semula tidak terhubung sama sekali melalui jalur udara. Sebagai contoh kecil, betapa mudahnya sekarang dari Yogyakarta untuk terbang langsung ke sejumlah kota besar di Indonesia tanpa harus melalui Jakarta atau Surabaya. Jika kita kalikan frekwensi pener-bangan tersebut dengan jumlah penumpangnya, maka akan terlihat dengan jelas se-makin banyaknya terjadi interaksi, hubungan antarwarga dari satu kota dengan warga kota lain di Indonesia sekarang ini. Data statistik mengenai ini tidak saya sajikan di sini karena keterbatasan ruang dan juga tidak sangat diperlukan.

Tidak hanya secara kuantitatif hubungan tersebut meningkat, tetapi juga secara ku-alitatif, sebagaimana tercermin dari semakin seringnya orang bepergian antarkota, antarpropinsi. Meningkatnya mobilitas geografis ini juga meningkatkan kontak-kontak antarindividu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di sinilah pengetahuan, pemahaman, pengalaman bertemu dengan warga suku yang lain bertambah, dan sedikit demi sedikit

menghapus beberapa stereotipe negatif antarsuku. Disadari atau tidak, meningkatnya interaksi antarwarga sukubangsa yang berbeda -lambat laun menguatkan hubungan-hubungan sosial di antara mereka, yang pada mulanya sangat rapuh.

3. Meningkatnya Pendidikan, Komunikasi dan Penggunaan Bahasa Indonesia

Jika dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa integrasi nasional dapat menguat jika ada Kebudayaan Nasional, dan bahasa nasional adalah salah satu unsur budaya nasional tersebut, maka integrasi nasional di Indonesia kini dapat dikatakan menguat karena penggunaan bahasa Indonesia sebagai lingua franca di Indonesia yang semakin luas, baik secara geografis maupun sosial. Secara geografis, karena bahasa Indonesia kini telah diajarkan di setiap jenjang pendidikan, di berbagai sekolah formal di berbagai daerah. Secara sosial, karena bahasa Indonesia sekarang digunakan oleh semakin ba-nyak warga negara Indonesia, mulai dari kanak-kanak, hingga kakek-nenek. Di sini kita lihat kebenaran pendapat Koentjaraningrat. Sayangnya, aspek sosial-budaya dan tek-nologi yang memungkinkan meluasya penggunaan bahasa Indonesia tersebut luput dari pembahasan beliau.

Penggunaan bahasa Indonesia yang meluas sebenarnya tidak serta-merta mengu-atkan integrasi nasional, karena bahasa Indonesia—yang sebenarnya satu rumpun de-ngan bahasa Melayu di Malaysia dan Brunei Darussalam—tidak dapat menyatukan Malaysia dan Brunei dengan Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia untuk memberita-kan berbagai peristiwa di Indonesialah yang menguatkan integrasi nasional. Mengapa demikian? Di sini kita ingat pendapat dari Ben Anderson mengenai bangsa sebagai su-atu *imagined community*. Anderson (1983) mengatakan bahwa suatu bangsa pada da-sarnya adalah suatu komunitas yang dibayangkan, dan imajinasi tentang komunitas ini dapat menguat karena berbagai faktor. Di Eropa, salah satu faktor ini adalah perpaduan antara kapitalisme dan teknologi percetakan. Kombinasi dua faktor ini telah membuat penerbitan buku dan surat kabar dengan bahasa lokal (etnis) di Eropa Barat me-ningkat dengan pesat, sehingga masyarakatnya menjadi sangat mudah mengetahui apa yang terjadi di kalangan mereka. Mereka lantas merasa berada dalam suatu komu-nitas karena mereka mengetahui dan menaruh perhatian pada

masalah-masalah yang sama, dan ini akibat dari mereka membaca surat kabar yang sama.

Hal itu juga terlihat di Indonesia ketika muncul surat-suratkabar berbahasa Melayu, yang dapat dimengerti oleh sebagian penduduk Nusantara. Suratkabar-suratkabar ter-sebut tanpa disadari telah berperan penting membangun sebuah imajinasi mengenai realitas tertentu, yang bersifat kolektif, dimiliki bersama. Proses penguatan imajinasi ini bertambah kuat setelah kemerdekaan, ketika semakin banyak warga negara Indonesia dapat menikmati siaran radio, siaran televisi, membaca suratkabar nasional dan daerah dalam bahasa Indonesia.

Di Indonesia, penggunaan bahasa Indonesia yang semakin meluas dapat terjadi ka-rena bantuan teknologi cetak dan teknologi komunikasi -terutama televisi, suratkabar-, dan sekarang ditambah internet. Perkembangan teknologi yang pesat ini membuat bahasa Indonesia semakin dirasakan sebagai bahasa persatuan, yang menghubungkan, menyatukan satu sukubangsa dengan sukubangsa lainnya. Di sisi lain pemberitaan berbagai hal yang terjadi di Indonesia melalui televisi dan suratkabar telah membuat para penonton televisi dan pembaca suratkabar tanpa sadar merasa berada dalam sa-tu komunitas, merasa sebagai warga dari sebuah negara yang sama.

Setelah Reformasi, *imagined community* yang sudah ada tumbuh semakin menguat karena semakin banyaknya stasiun televisi daerah dan suratkabar daerah. Meskipun ada stasiun televisi dan suratkabar yang kemudian tutup karena merugi, namun tidak sedikit yang tetap berhasil bertahan sampai sekarang. Bagaimanapun juga, jumlah sta-siun televisi setelah reformasi jauh lebih banyak daripada di masa Orde Baru (sebelum Reformasi). Demikian juga halnya dengan suratkabar. Di masa depan, jumlah stasiun televisi dan suratkabar ini tampaknya masih dapat bertambah, sehingga kita dapat menduga bahwa di masa depan integrasi nasional yang berbasis pada *imagined community* tersebut akan semakin menguat.

Siaran televisi yang menasional, yang dapat menjangkau ke berbagai daerah di In-donesia, dimungknkan oleh adanya satelit komunikasi. Dalam perspektif ini peluncurun satelit komunikasi Palapa merupakan sebuah tonggak penting dalam proses integrasi nasional di Indonesia. Berkat adanya satelit itulah seluruh wilayah Indonesia dapat terjangkau oleh siaran dari satu

stasiun televisi yang sama, TVRI. Peran TVRI memang sangat penting dalam proses integrasi nasional. Oleh karena semua penonton televisi Indonesia menonton siaran satu stasiun yang sama, maka kesatuan dalam sebuah *imagined community* menjadi cepat terbentuk.

Kesadaran sebagai warga sebuah bangsa juga diperkuat oleh semakin meluasnya pendidikan -berkat dibangunnya SD Inpres di banyak pelosok desa-, semakin menguatkan kesadaran murid-murid sekolah akan kewarganegaraan Indonesia mereka, akan kebangsaan Indonesia mereka. Kesadaran ini terbangun lewat penggunaan bahasa Indonesia, lewat pengajaran sejarah dan kebudayaan Indonesia, lewat upacara-upacara hari-hari penting nasional, lewat pertukaran pelajar, lewat pertandingan antar-pelajar, dan sebagainya.

Anehnya, berbagai fenomena ini luput dari perhatian Koentjaraningrat ketika beliau membahas tentang integrasi nasional. Saya masih belum bisa mengerti mengapa sebagai ilmuwan sosial-budaya, beliau luput memerhatikan berbagai perubahan penting di bidang komunikasi, yang sangat terkait dengan proses integrasi nasional tersebut. Beliau juga tidak menyinggung pendapat Ben Anderson tentang *imagined community*, yang sebenarnya sangat relevan dengan topik yang beliau bahas, yaitu integrasi nasional, padahal buku *Imagined Communities* terbit tahun 1983.

4. Semakin Meluasnya Ruang Ekspresi Budaya Etnis/Lokal

Terlaksananya Otonomi Daerah juga telah mengendorkan ketegangan hubungan antara pemerintah pusat—yang di masa Orde Baru terasa sangat sentralistis— dengan pemerintah daerah, dengan warga masyarakat di berbagai daerah. Sentralisasi yang begitu kuat telah menimbulkan kesan adanya proses "Jawanisasi" di berbagai daerah, yang kemudian menimbulkan pandangan negatif mengenai pemerintah pusat. Dilaksa-nakannya penyelenggaraan pemerintahan yang memberi keleluasaan pada pemerintah daerah, telah menurunkan keinginan beberapa daerah untuk lepas dari Indonesia.

Otonomi daerah ini kemudian diiringi dengan dibukanya ruang-ruang sosial yang lebih lebar sebagai arena ekspresi budaya-budaya lokal. Meskipun upaya mengungkap kearifan lokal sudah dilakukan semenjak pemerintahan Orde Baru, akan tetapi di masa kini upaya tersebut tidak hanya

berasal dari pemerintah, tetapi juga dari kalangan warga masyarakat sendiri, dan kerjasama masyarakat dengan pemerintah untuk mengungkap dan menampilkan budaya lokal ini terasa semakin menguat. Pemerintah memfasili-tasi upaya-upaya untuk mengangkat berbagai unsur budaya lokal yang khas agar men-dapat pengakuan sebagai warisan budaya nasional, atau bahkan kalau bisa mencapai tingkat internasional.

Apa yang terjadi kini agak berbeda dengan yang dibayangkan oleh Koentjaraningrat saya kira. Beliau -sepemahaman saya- berpandangan bahwa integrasi nasional dapat menguat melalui pengembangan Kebudayaan Nasional, yang berbeda dengan kebudayaan daerah atau kebudayaan etnik. Koentjaraningrat tampaknya belum membayangkan bahwa akan terjadi proses penasionalan unsur budaya etnik/daerah melalui proses pengakuan pemerintah atas unsur budaya tersebut sebagai warisan budaya nasional, yang bahkan bisa dilanjutkan hingga ke tingkat internasonal.

Semakin luasnya ruang ekspresi unsur budaya daerah/etnik juga terlihat pada digu-nakannya bahasa daerah oleh beberapa suratkabar daerah, oleh sejumlah televisi dae-rah dan di sejumlah bandara untuk pengumuman. Berbagai festival unsur budaya daerah (pakaian adat, makanan tradisional, kesenian daerah, dan sebagainya) juga semakin sering digelar, dan semenjak presiden Jokowi peringatan hari kemerdekaan di istana negara diiringi dengan penyajian keragaman 'pakaian nusantara' yang dikenakan oleh para petinggi Negara. Berbagai peristiwa ini tidak hanya meningkatkan kesadaran orang Indonesia tentang keragaman budaya, tetapi juga kebanggaan akan warisan budaya yang beragam tersebut, yang kemudian mendorong dilakukannya berbagai upaya untuk melestarikan berbagai unsur budaya daerah.

Berbagai ekspresi budaya etnik/lokal yang semakin meningkat frekwensinya dan semakin meluas jangkauannya, tidak dirasa membahayakan integrasi nasional, karena eskpresi keragaman tersebut mendapat legitimasinya dari semboyan 'bhinneka tunggal ika'. Ketika suatu pakaian daerah/etniknya dikenakan oleh presiden Indonesia dalam upacara kenegaraan, mereka yang berasal dari daerah/etnik tersebut akan merasa bangga karena mereka diterima, diakui dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Hal ini menguatkan kesadaran mereka tentang keIndonesiaan mereka, dan integrasi mereka dengan Indonesia. Dalam konteks di Indonesia

masa kini, ekspresi budaya kedaerahan atau kesukuan tidak lagi dipandang sebagai suatu hal yang akan mengganggu integrasi nasional, tetapi justru dapat menguatkannya.

5. Semakin Banyaknya Perangkat Simbol Politik Nasional

Yang dimaksud dengan simbol politik nasional adalah unsur-unsur budaya dalam sistem politik yang yang berskala nasional. Sistem politik berskala nasional ini antara lain adalah program pembangunan di tingkat nasional, partai politik, birokrasi (pemerintahan) dan pahlawan nasional. Sentralisasi kekuasaan di masa Orde Baru telah mem-buat seluruh daerah di Indonesia terhubung dengan sebuah pusat, yaitu Jakarta, yang sangat banyak menentukan berbagai kebijakan dan program di seluruh negeri. Kebijakan dan program yang memusat tersebut mau tidak mau membuat berbagai daerah di Indonesia menjadi sangat terhubung dengan pusat.

Di masa ketika integrasi nasional melemah -sebagai akibat dari peristiwa 30 September, serta masih kuatnya prasangka buruk antargolongan, antarsuku, dan antarumat beragama-, maka berbagai program yang diatur dan dijalankan dari oleh pemerintah pusat, serta dapat menjangkau ke seluruh pelosok negeri, merupakan sebuah sarana integrasi nasional yang sangat penting. Banyaknya program pembangunan di sebu-ah daerah dapat ditafsirkan sebaga sebuah 'pengakuan' atas daerah tersebut sebagai bagian dari sebuah negara bernama Indonesia.

Di era Reformasi, proses demokratisasi -yang membuat persaingan dan kadang-kadang konflik antarkelompok, antargolongan, antarkomunitas, menjadi lebih terbuka- juga dapat ditafsirkan sebagai sebuah proses sosial-politik yang secara tidak sengaja, atau tanpa direncanakan telah turut menguatkan tingkat integrasi nasional. Proses de-mokratisasi, baik berupa pemilihan kepala daerah atau calon legislatif, secara serentak di seluruh Indonesia, mau tidak mau, tanpa disadari telah turut memperkuat integrasi nasional, karena melalui proses demokratisasi ini warga negara Indonesia lantas me-miliki kesadaran bahwa mereka tengah terlibat dalam peristiwa yang kurang lebih sama, sehingga keIndonesiaan mereka juga lebih kuat terbentuk. Lagi-lagi *imagined community* yang ada kemudian tumbuh semakin menguat.

Kehadiran partai politik yang begitu banyak setelah Reformasi juga turut memperkokoh integrasi nasional. Melalui berbagai partai politik ini, mereka yang semula tidak pernah bersentuhan dengan unsur budaya nasional, kemudian bisa terlibat sangat intensif dalam partai politik, dan keterlibatan ini dapat membawanya naik ke panggung sosial-politik nasional. Mereka yang kemudian menjadi anggota partai dengan sendirinya masuk ke dalam sebuah jaringan sosial yang berskala nasional. Integrasinya ke dalam komunitas yang dibayangkan, yang bernama Indonesia, kemudian juga bertambah kuat.

Integrasi nasional secara politis juga dapat berlangsung melalui pengakuan sebagai pahlawan nasional atas individu-individu yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pengangkatan seseorang menjadi pahlawan nasional ini tidak hanya akan memberi dampak pada keluarga, tetapi juga pada komunitasnya, masyarakat di daerahnya atau bahkan sukubangsanya. Pengangkatan ini dapat ditafsirkan sebagai pengakuan Negara atau bangsa Indonesia atas sumbangan yang telah diberikan oleh individu –yang berarti juga komunitas atau sukubangsanya- kepada bangsa dan Negara tersebut dan pengakuan ini dengan sendirinya memperkuat relasi Negara –sebagai representasi bangsa Indonesia- dengan individu, komunitas atau sukubangsa tersebut.

Pada tataran simbol yang lebih lunak, penguatan simbol-simbol politik nasional terli-hat di era Reformasi -ketika integrasi nasional dirasakan berada dalam situasi kritis-, yaitu diangkatnya lagu Indonesia Raya sebagai pembuka untuk acara-acara resmi baik di kalangan pemerintahan maupun bukan. Lagu kebangsaan ini selalu mengingatkan setiap orang Indonesia akan pentingnya semangat kemerdekaan, kebangsaan Indonesia dan persatuan.

6. Semakin Menguatnya 'Imagined Community'

Bangsa -sebagaimana dikatakan oleh Anderson (1983)- adalah sebuah *imagined community*, sebuah komunitas yang dibayangkan. Imajinasi ini bisa tumbuh semakin menguat ketika ada sarana-sarana tertentu yang mendukungnya, menyebarkannya. Salah satu sarana yang sangat penting adalah media massa. Anderson menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di

Eropa semakin menguat kesadaran akan kebangsaannya ketika surat kabar -yang menggunakan bahasa-bahasa lokal di sana sebagai medianya-, terbit.

Imagined community ini sekarang semakin diperkuat oleh kehadiran handphone de-ngan berbagai aplikasinya, yang dapat menghubungkan individu satu dengan yang lain begitu mudah dan cepat. Ambil saja WA sebagai contohnya. Aplikasi ini telah me-mungkinkan terbentuknya berbagai komunitas virtual, yang kadang-kadang melakukan 'kopdar' untuk bertatap-muka langsung satu dengan yang lain, tidak hanya bertemu di dunia maya. Begitu banyak komunitas maya yang terbentuk ini jelas menguatkan inte-grasi sosial yang sudah ada.

Sarana lain yang juga memperkuat *imagined community* adalah internet. Melalui jaringan Facebook misalnya kita dapat berhubungan dengan banyak teman-teman kita yang sudah lama tidak kita jumpai, bahkan berteman dengan orang-orang baru melalui relasi-relasi kita dengan teman-teman yang lama. Tanpa disadari, dalam kelompok-kelompok facebookers ini terjadi pertukaran-pertukaran sosial, yang kemudian menguat-kan integrasi sosial yang sudah ada, karena jejaring baru yang terbentuk semakin banyak.

Imagined community ini juga diperkuat oleh pemberitaan peristiwa-peristiwa yang menyedihkan dengan dampak yang begitu luas, seperti bencana alam. Tsunami di Aceh, gempa di Lombok dan di Palu, selain menimbulkan kehancuran dan kesedihan, juga menguatkan *imagined community* bangsa Indonesia, menguatkan integrasi nasional di situ, karena kemudian melahirkan berbagai kerjasama nasional untuk me-nolong mereka yang tertimpa musibah. Kota Palu dan Donggala yang selama ini tidak selalu terdengar beritanya di tingkat nasional, kemudian diketahui keadaannya, dan pengeta-huan kita mengenai daerah-daerah ini bertambah banyak. Palu dan Donggala kemudian lebih kuat lagi masuk dalam imajinasi kita sebagai bagian dari Indonesia. Di sinilah integrasi nasional daerah tersebut -pada tataran kesadaran kolektif kita-, kemudian ber-tambah kuat.

Imajinasi juga tambah menguat ketika individu dari berbagai daerah kemudian memberikan sumbangan (berupa uang dan harta) kepada para korban gempa di Palu dan Lombok, karena di sini terjadi proses-proses pertukaran antara korban gempa dengan penolong-penolong yang berdatangan ke wilayah itu. Dalam situasi seperti itu, berbagai stereotipe negatif mengenai kelompok yang lain disingkirkan dari pikiran agar dapat

terjalin kerjasama dengan setiap orang, setiap kelompok, untuk mengatasi musi-bah yang terjadi. Integrasi nasionalpun menguat tanpa disadari dan direncanakan.

Imagined community yang menguat juga terlihat pada ekspresi "NKRI Harga Mati". Di era Orde Baru, pernyataan ini setahu saya belum ada. Ekspresi ini muncul di era Reformasi ketika banyak anak bangsa merasakan betapa kesatuan dan persatuan Indonesia tengah terancam. Dengan ekspresi "NKRI Harga Mati" setiap orang Indonesia diingatkan kembali akan persatuan dan kesatuan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, alias "Harga Mati", dan untuk itu pula setiap orang siap untuk mati.

7. Semakin Kuatnya Polisi dan Angkatan Bersenjata

Angkatan bersenjata dan polisi adalah alat Negara yang sangat penting untuk men-jaga kesatuan wilayah, kedaulatan dan keamanan. Integrasi nasional tidak mungkin di-pertahankan tanpa kehadiran dua alat Negara tersebut. Apakah polisi dan angkatan bersenjata Indonesia semakin kuat? Jika kita bandingkan dengan kondisi mereka di masa setelah kemerdekaan, sangat jelas bahwa kepolisian dan TNI kini bertambah baik kualitasnya, bertambah profesional, bertambah canggih peralatannya. Berkat kehandalan mereka dalam menjalankan tugas, dan semakin terlihatnya kehadiran mereka di berbagai daerah dan pelosok, integrasi nasional Indonesia tetap terjaga. Uraian mengenai faktor angkatan bersenjata dan polisi dalam penguatan integrasi nasional tidak akan saya perpanjang, karena kita semua bisa mengetahuinya dari pengalaman kita sehari-hari.

Uraian tentang berbagai faktor di atas cukup kiranya untuk menunjukkan bahwa in-tegrasi nasional Indonesia sekarang sebenarnya berada dalam situasi dan kondisi yang baik, yang dapat saya beri nilai: 8. Meskipun demikian, oleh karena situasi dan kondisi ini seperti bandul jam, selalu bergerak ke kanan-ke kiri, kadang-kadang menuju ke sangat terintegrasi, kadang-kadang melemah, dan menuju ke arah disintegrasi, maka kita harus selalu waspada, agar gerakan bandul tersebut tidak terlalu jauh ke arah disintegrasi. Oleh karena itu, kita perlu mengetahui faktor-faktor yang dapat membawa situasi dan kondisi integrasi ke arah yang semakin lemah, sehingga kita dapat bersiap-siap dan berupaya mencegahnya menuju titik disintegrasi.

2. BEBERAPA FAKTOR PELEMAH INTEGRASI NASIONAL

Dengan menggunakan model pendulum (bandul jam), upaya kita untuk memahami gejala-gejala integrasi nasional dan menjelaskan pelemahannya, menjadi terasa lebih mudah, karena kita tidak terjebak pada suatu imaji kebangsaan yang statis, dengan warna hitam dan putih saja. Bahwa integrasi nasional pada dasarnya merupakan rela-si-relasi antaranak bangsa, relasi antarkelompok sosial, antarlapisan sosial yang ber-tambah banyak, yang membuat kesatuan bangsa di situ menjadi lebih kuat dan ulet. Relasi-relasi ini kadang-kadang melemah atau bahkan terputus, sehingga integrasi sosial nasional di situ juga melemah. Oleh karena itu, membahas mengenai integrasi nasional tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang diperlukan untuk menguatkan integrasi tersebut, tetapi juga faktor-faktor yang turut serta melemahkannya.

Oleh karena situasi dan kondisi integrasi nasional kini sudah saya anggap baik (nilai 8 atau A), maka yang diperlukan sekarang adalah pengetahuan tentang faktor-faktor atau hal-hal yang akan dapat membuat integrasi nasional yang sudah bagus tersebut merosot di kemudian hari. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah:

1. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi masih menyimpan potensi untuk terjadinya konflik atau kekacauan sosial, sebagaimana pernah kita alami di tahun 1998. Ketimpangan ekonomi, yang diiringi dengan pelapisan sosial yang semakin jelas dan jarak sosial yang semakin jauh, akan mudah menimbulkan kecemburuan sosial, irihati dan dendam kolektif di kalangan mereka yang berada di lapisan bawah. Cemburu, irihati dan dendam suatu kelas, komunitas atau kelompok itu biasanya akan sangat mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan politik tertentu, untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Jika mereka yang berada di lapisan bawah dapat diyakinkan bahwa apa yang mereka alami merupakan akibat dari kebijakan pemerintah atau siasat dari kelas dan kelompok di lapisan atas, maka dendam mereka kemudian dapat disalurkan dan diarahkan kepada mereka yang ada di atas tersebut. Mereka yang memiliki agenda politik tertentu akan dapat memanfaatkan kondisi ketidakpuasan ini (cemburu sosial, irihati dan dendam). Mereka

dapat saja kemudian mengajak kelas dan kelompok "sakit hati" tersebut untuk bersatu dan kemudian mengambil alih kekuasaan secara paksa. Hal semacam inilah yang akan melemahkan integrasi nasional.

2. Intoleransi

Intoleransi di sini saya maknai sebagai ketidaksediaan untuk menerima perbedaan, baik itu perbedaan dalam pandangan hidup, adat-istiadat, atau agama, dan selalu me-mandang pihak yang lain, yang berbeda, sebagai pihak yang salah. Oleh karena itu, pihak "lain" tersebut harus diajak, kalau perlu dipaksa, mengikuti pandangan kelompok atau golongannya sendiri yang dianggap sebagai pandangan yang paling benar.

Intoleransi ini bisa datang dari golongan mayoritas maupun minoritas, ketika mereka merasa memiliki kekuatan dan kekuasaan yang paling besar atau minimal lebih besar daripada golongan yang lain. Jika golongan tersebut adalah minoritas dalam hal jumlah pendukung misalnya, intoleransi dari golongan ini dapat melemahkan integrasi nasional bilamana kekuasaan yang dimilikinya lebih besar daripada golongan mayoritas. Namun, intoleransi dari golongan mayoritas bisa lebih buruk lagi, karena dengan jumlah pendukung yang lebih banyak intoleransi oleh pihak ini terhadap golongan minoritas dapat lebih buruk, lebih semena-mena, karena dukungan kekuasaan yang lebih besar. Kekuasaan dan kekuatan di tangan golongan mayoritas akan sangat mudah melemah-kan integrasi nasional, karena membuat golongan ini meremehkan integrasi nasional itu sendiri.

3. Rekayasa Berita Bohong, Ujaran Kebencian dan Fitnah

Di masa lalu berita bohong dan fitnah mungkin tidak dirasakan begitu penting aki-batnya bagi integrasi nasional di masa lalu. Akan tetapi, dengan begitu pesatnya per-kembangan teknologi komunikasi dan teknologi percetakan, berita bohong dan fitnah ternyata dengan mudah "disulap" menjadi berita yang seolah benar dan bukan fitnah. Mereka yang tidak memahami teknologi fotoshop misalnya, tidak selalu mampu mengetahui apakah foto yang ditampilkan adalah sebuah foto kejadian yang nyata atau hasil sebuah rekayasa fotografis. Begitu pula mereka yang tidak biasa melihat video, seringkali tidak dapat membedakan apakah yang

didengarnya adalah juga yang sebe-narnya diucapkan oleh sosok yang sedang bicara dalam video.

Keawaman orang atas hasil rekayasa teknologi membuat orang tidak selalu mampu membedakan antara "peristiwa yang sebenarnya" dengan hasil rekayasa videografis atau fotografis, dan ini membuat orang tidak lagi dapat membedakan hal "yang sebenarnya" dengan "yang bukan sebenarnya". Di sinilah kemampuan untuk membedakan antara "yang benar dan baik" dengan "yang salah dan buruk" tidak lagi dapat dipakai, yang akan membuat orang menjadi mudah diadu-domba; hubungan antargolongan, antarlapisan sosial, antarkelompok mudah dirusak; relasi penuh rasa curiga mudah dikembangkan, yang semuanya akan berakibat pada melemahnya integrasi sosial, integrasi nasional.

4. Ideologi dan Sistem Politik Alternatif

Ideologi selain Pancasila yang diyakini lebih baik daripada Pancasila, atau sistem politik yang berbeda, dan juga diyakini lebih baik daripada yang sudah ada sekarang, akan dapat melemahkan integrasi nasional secara signifikan. Mungkin hal itu tidak akan menyebabkan terjadinya disintegrasi, akan tetapi bukan tidak mungkin juga dis-integrasi terjadi, jika konflik antara pendukung ideologi negara Pancasila dengan pendukung ideologi alternatif terjadi berlarut-larut—karena sama-sama kuat—dan kedua belah pihak yang bertikai kemudian bersepakat untuk hidup berpisah, dan masing-masing membentuk negara baru sendiri, atau kedua-duanya bertikai hingga "tumpes kelor", sehingga negara secara sosio-kultural-ekonomi-politik terbelah. Oleh karena itu, hadirnya ideologi alternatif—entah itu yang kanan atau yang kiri, esktrem kanan atau ekstrim kiri—harus selalu diwaspadai.

Ideologi alternatif dapat membawa bangsa pada disintegrasi, jika dibiarkan tumbuh dan mewujud menjadi sistem politik, sistem birokrasi dan mampu membentuk mesin keamanan negara yang baru, yang menjadi tandingan sistem politik, birokrasi dan me-sin keamanan negara yang sudah lebih dulu ada. Untuk mencegahnya, setiap ideologi negara baru yang ditawarkan harus dapat dibahas dengan kritis dan secara terbuka, sehingga kelemahan-kelemahan dan kelebihannya dapat diketahui, dan apakah ideolo-gi alternatif itu akan membahayakan ideologi negara yang sudah ada, atau justru dapat menguatkannya, dan memperkokoh integrasi nasional.

5. Pembodohan Sosial

Pembodohan sosial adalah proses komunikasi—yang seringkali lebih merupakan monolog daripada dialog—antara tokoh-tokoh masyarakat, kaum intelektual, politisi, birokrat, ulama, dan sebagainya dengan masyarakat awam, di mana pihak pertama lebih banyak memberikan pesan, informasi, pandangan, doktrin-doktrin, yang mereka ang-gap benar kepada pihak kedua—yang dianggap kurang mengetahui, memahami—pola dan isi pengetahuan mereka, tanpa adanya kesempatan pihak kedua untuk merespon, menanggapi atau membantahnya. Pembodohan sosial ini terjadi ketika persaingan untuk memperebutkan penguasaan atas sumber daya manusia atau alam, semakin meningkat, yang dilakukan dengan memanfaatkan simbol-simbol kegamaan, atau simbol-simbol komunitas lokal. Pembodohan ini umumnya terjadi dalam ceramah-ceramah yang tampaknya sengaja dibuat tidak interaktif agar proses "indoktrinasi" (baca: pembodohan) dapat berjalan dengan lancar, tanpa gangguan.

Pembodohan sosial dapat melemahkan integrasi sosial, karena dalam proses ini warga masyarakat yang terlibat di dalamnya tanpa sadar diarahkan oleh penceramah agar memiliki pandangan negatif mengenai kelompok sosial-ekonomi-agama-budaya-politik tertentu, yang diinginkan untuk dipinggirkan atau digantikan kedudukannya. Proses pembodohan sosial biasanya sangat effektif dilakukan melalui mimbar-mimbar agama, karena di situ dialog interaktif, kritis, dan terbuka tidak diperkenankan, tetapi diterima dengan rela oleh semua pesertanya. Tidak mengherankan jika proses pembodohan sosial ini sering dilakukan oleh para pemuka agama yang memiliki agenda politik tertentu.

6. Korupsi

Apakah korupsi mengancam integrasi sosial nasional? Sebagian ternyata kurang sepakat kalau korupsi dianggap dapat melemahkan integrasi sosial, apalagi integrasi nasional, karena korupsi pada umumnya dilakukan oleh individu. Meskipun di Indone-sia sempat muncul istilah "korupsi berjamaah", yang mengakibatkan sejumlah individu bersama-sama harus menjalani hukuman penjara, akan tetapi dampaknya tidak dianggap cukup melemahkan integrasi sosial. Meskipun korupsi tersebut dilakukan secara berjamaah, akan tetapi "jamaah" di situ berbeda dengan kelompok-

kelompok individu yang memiliki agenda politik tertentu, sehingga effek disintegratifnya kurang terasa.

Sebagian lagi berpandapat bahwa korupsi telah melemahkan integrasi sosial, karena dana-dana yang dikorupsi sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas sosial yang dapat menguatkan integrasi sosial, atau hasil kegiatan tersebut dapat di-manfaatkan untuk berbagai kegiatan yang kemudian juga memperkokoh relasi-relasi sosial yang sudah ada. Dengan demikian, korupsi di situ telah menghambat munculnya berbagai kegiatan sosial yang akan dapat menguatkan integrasi sosial.

IV. PENUTUP

Dalam makalah ini saya mencoba menyajikan kembali pokok-pokok pikiran Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional. Beliau adalah salah satu -jika bukan satu-satunya- ilmuwan sosial yang paling tekun mengamati dan menganalisis gejala integrasi nasional di Indonesia. Di kalangan ahli antropologi, beliaulah satu-satunya yang konsisten menaruh perhatian pada masalah tersebut. Tidak mengherankan jika pemikiran beliau mengenai integrasi nasional adalah yang paling serius dan terus berkembang di Indonesia. Sayang sekali, belum ada seorangpun dari murid-murid beliau yang kini meneruskan pemikiran tersebut.

Dari paparan di atas terlihat bahwa sebagian pendapat Koentjaraningrat mengenai integrasi nasional Indonesia di masa lalu masih relevan di masa kini. Pemikiran beliau mengenai kebudayaan nasional masih tetap dapat dimanfaatkan, dan kini telah banyak diwujudkan, walaupun mungkin berbeda dengan yang beliau bayangkan. Meskipun Kebudayaan Nasional ini tumbuh terus, namun tidak banyak unsur budaya baru yang dapat mencapai taraf mendapat pengakuan dari pemerintah sebagai unsur budaya Nasional Indonesia. Yang banyak terjadi sekarang adalah pengakuan oleh pemerintah atas unsur budaya daerah atau etnis sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Unsur budaya etnik yang unik, khas, ini kemudian betul-betul dinobatkan menjadi unsur budaya nasional. Contohnya adalah noken dari Papua.

Pemikiran-pemikiran Koentjaraningrat yang lain ternyata kini kurang relevan, karena masalah integrasi nasional sudah berubah. Hubungan antara mayoritas dan minoritas misalnya, terutama orang Tionghoa dengan

"pribumi", titik persoalannya ternyata bukan pada "salah pengertian" -walaupun ini juga ada pengaruhnya-, tetapi pada hal yang lain, dan tidak harus berkaitan dengan persoalan identitas, sebagaimana yang beliau duga. Selain itu, beliau kurang kritis terhadap model "plural society" dari Furnivall. Andai saja beliau menganalisis masyarakat ini betul-betul dan mencoba mencarikan jalan untuk membangun masyarakat yang lebih terintegrasi, beliau mungkin akan dapat memberikan saran-saran yang lebih kongkrit dan *applicable*.

Secara keseluruhan kita sekarang dapat melihat bahwa analisis Koentjaraningrat atas masalah integrasi nasional masih kurang tajam karena beliau tidak pernah mencoba mendefinisikan dan menjelaskan apa yang dimaksud dengan "masalah integrasi nasional" itu sendiri. Akibatnya, fokus analisis dan pembahasan beliau berpindah-pindah sehingga tidak bisa tajam dan tuntas. Untuk mengatasi persoalan itu di sini saya menawarkan paradigma yang berbeda, mengenai integrasi nasional dan masalahnya.

Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa integrasi sosial pada dasarnya adalah suatu kondisi dari keseluruhan relasi-relasi yang ada dalam sebuah sistem sosial. Integrasi sosial yang kuat terjadi ketika relasi-relasi dalam suatu sistem sosial -bisa berupa bangsa, sukubangsa, masyarakat, komunitas, atau kesatuan sosial lainnya- berada dalam hubungan yang selaras, harmonis, sedang integrasi sosial yang lemah adalah kondisi di mana relasi-relasi di situ tidak harmonis, yaitu ada yang berlawanan, ada yang putus. Disintegrasi terjadi ketika sebagian relasi-relasi sosial di situ kemudian memi-sahkan diri membentuk sebuah sistem yang baru. Kondisi integrasi ini selalu dinamis, selalu bergerak -seperti bandul jam- dari kutub "sangat terintegrasi" ke kutub "disintegrasi".

Model itu memungkinkan kita menengarai kapan sebuah sistem sosial bergerak ke arah "sangat terintegrasi" menuju ke arah "disintegrasi" dan sebaliknya. Model ini juga memungkinkan kita memantau dan menentukan kondisi integrasi sebuah sistem sosial dengan cara mengidentifikasi dan mengukur jumlah relasi sosial yang relatif selaras, dan relasi sosial yang kurang selaras atau berlawanan, atau yang terputus. Dengan model tersebut integrasi nasional di sebuah Negara dapat dilihat sebagai suatu kondisi yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang dapat dikelompokkan menjadi faktor penguat dan faktor pelemah (yang melemahkan) integrasi sosial (nasional).

Model itu juga memungkinkan kita menentukan indikator-indikator integrasi nasional dan menentukan tingkat atau nilainya, sehingga kita dapat memonitor dan mengevaluasi kondisi integrasi nasional ini dalam suatu waktu tertentu. Dengan begitu, kita juga dapat melakukan antisipasi dan menentukan langkah-langkah untuk penguatan integrasi, ketika integrasi tersebut terlihat melemah. Dengan paradigma ini, integrasi sosial, integrasi nasional menjadi suatu fenomena yang dapat kita tangani dengan lebih mudah, lebih effisien dan lebih effektif.

Semoga pemikiran ini dapat membantu memudahkan upaya-upaya penguatan integrasi sosial, integrasi nasional di manapun diperlukan, oleh siapapun…

Yogyakarta – Jakarta,
Terban – Kemang Timur,
Pertengahan Oktober
yang masih panas
2018

DAFTAR PUSTAKA

Ahimsa-Putra, H.S. 1991. "Hambatan Budaya Dalam Integrasi Politik: Sulawesi Selatan Pada Abad ke 19". Buletin Antropologi 16. Th.VII: 29-72.

_____. 1999a. Kemajemukan Budaya, Demokrasi, Komunikasi dan Integrasi Nasional. Makalah seminar nasional "Public Relations Untuk Partai Politik", AKINDO, di Yogyakarta, 10 April.

_____. 1999b. Memahami Keanekaragaman Budaya Untuk Persatuan Bangsa. Makalah dalam "Bimbingan Teknis Penganalisisan dan Pembinaan Kebudayaan", Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, di Puncak, Bogor, 15 Juni.

_____. 1999c. Pluralitas, Demokratisasi dan Integrasi Nasional. Makalah dalam Internship Ketahanan Nasional, Program Studi Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 7 Oktober.

_____. 2002a. "Corak Hubungan Sosial Masyarakat Majemuk di Indonesia dalam Rangka Pembangunan Nasional". Jurnal Ketahanan Nasional VII (2): 39-52.

_____. 2002b. "Pluralitas Budaya dan Kekerasan Massal: Adakah Hubungannya?" dalam Integrasi, Moral Bangsa dan Perubahan, Sumijati As dkk (eds.). Yogyakarta; Sinergi Press.

_____. 2007. Kemajemukan Budaya di Indonesia: Bagaimana Menyikapinya?. Makalah seminar "Peran Pemuda Nusantara Menyikapi Pluralitas Budaya Daerah Untuk Kelestarian Budaya Bangsa" diselenggarakan oleh IKPMD Indonesia Yogyakarta, di Yogyakarta, 24 Februari.

_____. 2008. Pluralism without Multiculturalism. Makalah konferensi internasional "Towards an Inclusive Democratic Indonesian Society" diselenggarakan oleh Universitas Atma Jaya, di Yogyakarta, 18-19 Juli.

_____. 2009. Dari Plural ke Multikultural: Tafsir Antropologi Atas Masyarakat Indonesia. Makalah lokakarya "Multikulturalisme dalam Pembangunan di Indonesia", diselenggarakan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, di Yogyakarta, 12 Agustus.

_____. 2013. "Budaya Bangsa, Jati Diri dan Integrasi Nasional: Sebuah Teori". Jejak Nusantara. Edisi Perdana. Tahun I: 6-19.

_____. 2014. Bahasa, Pluralisme dan Multikulturalisme. Makalah seminar nasional "Bahasa dan Sastra dalam Ekologi dan Multikulturalisme", diselenggarakan oleh Fakultas Bahasa dan Seni, UNY, di Yogyakarta, 28 Nopember.

_____. 2015. Membangun Multikulturalisme dan Membangun Indonesia. Makalah disampaikan dalam seminar nasional "Multikultur Pendukung Pembangunan Nasional", diselenggarakan oleh Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas, Negeri Gorontalo, di Gorontalo, 18 November.

Anderson, B.O. 1991(1983). Imagined Communities. London: Verso.

Furnival, J.S. 1939. Netherlands India. Cambridge: Cambridge University Press.

Koentjaraningrat. 1969. Arti Antropologi untuk Indonesia Masa Ini. Djakarta: LIPI

_____. 1982. "Lima Masalah Integrasi Nasional" dalam Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan, Koentjaraningrat (peny.). Jakarta: LP3ES

_____. 1993. Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional. Jakarta: UI Press.

BIODATA

Prof Heddy Shri Ahimsa-Putra, MA, M.Phil, Ph.D

Guru besar antropologi Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (UGM). Lahir di Yogyakarta, 28 Mei 1954. Memperoleh pendidikan bidang antropologi di Universitas Gadjah Mada (Sarjana Muda); Universitas Indonesia (S-1 dan S-2); Rijksuniversiteit Leiden, Belanda (Pascasarjana); dan Columbia University, New York City, Amerika Serikat (MA, M.Phil, dan Ph.D)

Mengajar di program S-3 Ilmu-Ilmu Humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, dan di Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di samping itu ia juga jadi pengajar program pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi lain, termasuk Institut Seni Indonesia (ISI), Surakarta; Universitas Negeri Sebelas Maret; Universitas Airlangga; Universitas Islam Indonesia; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga; dan Universitas Udayana, Denpasar. Pada 2004, ia pun sempat menjadi dosen tamu di Jurusan Antropologi Dagon University, Yangoon, Myanmar.

Sebagai peneliti, pernah menjadi peneliti di Department of Anthropology, Columbia University (1992); Pusat Studi Kebudayaan, UGM (1996-2004); dan sejak 1997 sampai hari ia menjadi peneliti senior Pusat Studi Pariwisata, UGM. Aneka penelitian sosial-budaya pernah ia lakukan di berbagai tempat di Indonesia, mulai dari Sumatera Selatan, Bali, Sulawesi Selatan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, hingga di Yogyakarta sendiri. Di luar negeri, Heddy Shri Ahimsa-Putra juga pernah melakukan penelitian di Drenthe, Belanda (1982) dan di daerah danau Inlay, Myanmar, pada 2006-2007.

Di luar kampus, Heddy Shri Ahimsa-Putra antara lain penah menjadi anggota delegasi Indonesia pada Multicultural Mission (MCM) ASEAN-Japan (1995-1997); anggota Tim Ahli pada Balai Studi dan Konservasi Borobudur (2000-2008); anggota Dewan Pertimbangan Pelestarian Warisan Budaya, DI Yogyakarta (2008-2010); anggota Tim Pakar Riset Tanaman Obat dan Jamu (Ristoja) (2017); serta menjadi Ketua Asosiasi Tradisi Lisan, Yogyakarta (sejak 2017).

Buku-buku yang ditulis Heddy Shri Ahimsa-Putra antara lain berjudul *Keluarga Ngadimin and Others* (dalam bahasa Jepang); *Minawang*, mengenai hubungan patron-klien di Sulawesi Selatan (1988); *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*; *Strukturalisme Lévi-Strauss, Mitos dan Karya Sastra*; serta *Paradigma Profetik Islam:* serta *Epistemologi, Etos dan Model,* yang terbit pada 2016 lalu. Selain itu, Heddy pun banyak menulis artikel yang dimuat di berbagai mjalah dan jurnal ilmiah, seperti *Basis*, *Prisma* (LP3ES), *Masyarakat Indonesia* (LIPI), *Masyarakat dan Kebudayaan* (LIPI), *Humaniora* (Fakultas Ilmu Budaya, UGM), *Kalam*, dan *Asian Journal of Social Science*. Di samping itu, ia sudah pula menulis sekitar 400 makalah untuk berbagai konferensi, seminar, lokakarya, dan pelatihan.

PROFIL FKAI

PROFIL FKAI

Forum Kajian Antropologi Indonesia mengucapkan terimakasih kepada

- Bapak Franciscus Welirang
- Bapak Jusuf Sutanto
- Bapak Theo T Gazali
- Bapak Tjung Gozali Joehana

Susunan Panitia

Ketua Pelaksana	: Mulyawan Karim
Sekretaris	: Wieke Dwiharti
Bendahara	: Lamtiur Tampubolon, Notty J Mahdi
Persidangan	: Raymond Michael, Luluk Lukmiyati
Protokoler dan Perlengkapan	: Bintang Y Soepoetro
Konsumsi	: Amalia Shadily
Dokumentasi	: Tito Panggabean
PiC Bentara Budaya Jakarta	: Ika W. Burhan
PiC Bentara Budaya Yogyakarta	: M. Wuryani

http://fkai.org